

**EVALUASI KEBIJAKAN AKSI KONVERGENSI PADA PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Agus Romadhon<sup>1</sup>  
Harits Hijrah Wicaksana<sup>2</sup>

*<sup>1,2</sup> Magister Administrasi Publik, Universitas Esa Unggul*

Alamat email Koresponden: [agusromadhon207@gmail.com](mailto:agusromadhon207@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Stunting is a critical public health issue in Indonesia. This study investigates the convergence action policy to examine how stunting reduction has improved in West Jakarta. A descriptive qualitative method was employed in this study, collecting data through interviews, observations, and documentation studies with relevant informants. The Bernard method was used for data analysis, which included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of the convergence action policy in West Jakarta has not been optimal due to sectoral egos among regional agencies, poor coordination, and uneven understanding of the policy in the field. Although nutrition interventions and cross-sectoral engagement have increased, the eight convergence actions have not been fully successful. This study demonstrates that the policy to accelerate stunting reduction relies heavily on inter-agency collaboration, improved human resource capacity, and an integrated data management system.*

**Keywords** : *Policy Evaluation, Convergence Action, Stunting, Stunting Reduction, West Jakarta*

**PENDAHULUAN**

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, negara memprioritaskan masalah stunting sebagai salah satu masalah kesehatan masyarakat. Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang terjadi selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari masa kehamilan hingga dua tahun pertama kehidupan anak. Tidak dapat diperbaiki, masalah ini

menyebabkan keterlambatan perkembangan fisik dan kognitif (Yuwanti et al., 2022; Arifuddin et al., 2023).

Negara menempatkan stunting sebagai salah satu masalah kesehatan masyarakat yang paling penting saat berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang terjadi selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), atau dari masa kehamilan hingga dua tahun pertama kehidupan anak. Masalah ini menyebabkan keterlambatan perkembangan fisik dan kognitif yang tidak dapat diperbaiki (Yuwanti et al., 2022; Arifuddin et al., 2023).

Untuk mencapai konvergensi program pencegahan stunting, ada banyak masalah yang harus diatasi. Menurut penelitian Permanasari, ego sektoral di antara OPD, sosialisasi yang kurang baik, dan pemahaman yang kurang menyeluruh menyulitkan pelaksanaan aksi konvergensi (Permanasari et al., 2020). Supriyanto dan Jannah (2022) juga menyatakan bahwa koordinasi, cakupan, dan kualitas lembaga yang buruk menghambat program. Ada efek jangka pendek dan panjang dari stunting. Efek jangka pendek termasuk gangguan perkembangan fisik, kognitif, dan motorik. Efek jangka panjang termasuk penurunan kapasitas intelektual dan peningkatan risiko diabetes, penyakit jantung, dan kecacatan pada usia tua (Fitriani Pramita Gurning et al., 2021; Arifuddin et al., 2023).

Untuk mempercepat penurunan angka stunting, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Strategi konvergensi yang ditetapkan dalam RPJMN 2020–2024 diperkuat dengan delapan aksi konvergensi, yang mencakup analisis situasi dan revaluasi kinerja tahunan (Perpres, 2020).

Meskipun demikian, upaya yang dilakukan belum mencapai tingkat yang optimal. Tidak terintegrasi sistem manajemen data, kurangnya cakupan program, dan kurangnya pemahaman teknis di lapangan. Meskipun demikian, penyebab stunting sangat beragam, termasuk kekurangan gizi, akses ke sanitasi, dan pola pengasuhan (Arring & Winarti, 2024; Hasan & Kadarusman, 2019; Adriany et al., 2021; Rahman et al., 2024; Hasanah et al., 2021).

Penelitian dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Barat karena prevalensi stunting yang relatif tinggi sebesar 17.1% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa stunting tidak hanya terjadi di daerah pedesaan tetapi juga di wilayah perkotaan padat seperti Jakarta. Selain itu, Jakarta Barat adalah salah satu daerah di mana lebih banyak keluarga berisiko stunting. Pada tahun 2024, akan ada 69.553 keluarga di wilayah ini. Implementasi kebijakan menghadapi tantangan tersendiri karena kompleksitas masalah sosial, kependudukan, dan sanitasi di wilayah ini. Sebaliknya, Jakarta Barat telah berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan nasional percepatan penurunan stunting melalui delapan aksi konvergensi. Oleh karena itu, perlu dievaluasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Barat dari Januari hingga Mei 2025. Lokasi ini dipilih karena tingkat stuntingnya yang tinggi dan karena merupakan wilayah yang harus diprioritaskan untuk menerapkan kebijakan percepatan penurunan stunting. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dianggap sesuai untuk memahami dinamika sosial dan pengalaman yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Pendekatan ini juga dapat

menghasilkan temuan yang kontekstual dan bermakna (Saleha Mufida, Timur, & Waluyo, 2023). Model Context, Input, Process, and Product (CIPP) Stufflebeam digunakan untuk mengevaluasi kebijakan.

Data primer dan sekunder adalah dua jenis data yang digunakan. Data primer diperoleh melalui observasi terfokus dan wawancara mendalam. sementara data sekunder berasal dari laporan kinerja TPPS, pedoman aksi konvergensi nasional, dan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 981 Tahun 2022. Metode pemilihan informan awalnya dilakukan secara purposive; kemudian, metode sampling bola salju diperluas. Informan utama adalah Ketua TPPS Kota Administrasi Jakarta Barat, sedangkan informan pendukung berasal dari Suku Dinas Kesehatan, Suku Bappeda, Suku Dinas PPAPP, dan individu masyarakat.

Panduan semi-terstruktur digunakan untuk melakukan wawancara secara langsung. Kegiatan strategis seperti rembuk stunting, pelatihan tenaga kesehatan, dan monitoring lintas sektor diawasi secara langsung. Peneliti juga menulis proses kegiatan di lembar observasi sebagai bukti. Selain itu, dokumen yang ditelaah diperiksa untuk mendukung data empiris yang dikumpulkan dari lapangan (Diatmono, Mariam, & Ramli, 2023).

Sugiyono (2019) menyarankan untuk triangulasi metode dan sumber dengan membandingkan data dari observasi, dokumen, dan wawancara untuk memastikan keabsahan data. Peneliti juga menggunakan member checking untuk mengonfirmasi bahwa data yang diberikan kepada informan adalah akurat. dan debriefing rekan sejawat dengan rekan sejawat untuk mencegah penafsiran yang tidak akurat. Untuk meningkatkan

kredibilitas, informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan juga dipilih (Rustanto & Akhmad, 2020).

Tiga langkah utama terlibat dalam analisis data, yang dilakukan menggunakan Bernard (2017): reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Data disusun dalam bentuk naratif dan tematik berdasarkan empat komponen utama model CIPP. Proses verifikasi terus menerus dilakukan untuk memastikan bahwa pola-pola konsisten dan hubungan antara hasil ditemukan. Karena setiap langkah penelitian disusun secara menyeluruh dan sistematis sesuai dengan standar penelitian kualitatif, rangkaian metode ini memungkinkan penelitian ini direplikasi oleh peneliti lain.

## **Kerangka Teori**

### *Konsep Evaluasi Kebijakan*

Dalam penelitian ini, model evaluasi yang digunakan adalah CIPP Evaluation Model. Model ini dinilai sangat komprehensif karena mencakup empat aspek utama, yaitu Context, Input, Process, dan Product. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Guba, kemudian disempurnakan oleh Stufflebeam pada tahun 1965 (Stufflebeam & Zhang, 2017). Model CIPP berfungsi sebagai kerangka sistematis untuk mengevaluasi berbagai program, proyek, produk, personel, institusi, dan sistem. Dengan mengevaluasi aspek-aspek tersebut secara terintegrasi, model ini mendukung penilaian kebutuhan, perencanaan, pemantauan implementasi, serta memberikan umpan balik untuk meningkatkan dan memastikan keberlanjutan program.

Menurut Arikunto dan Jabar (2007), sebagaimana dikutip dalam Siregar (2021), Model Context, Input, Process, Product (CIPP) adalah model evaluasi yang melihat program sebagai sistem. Sasaran model evaluasi Context Input Process Product (CIPP) memiliki empat komponen dasar dari proses sebuah program kegiatan. Komponen tersebut antara lain evaluasi terhadap konteks (context evaluation), evaluasi terhadap masukan (input evaluation), evaluasi terhadap proses (process evaluation), evaluasi terhadap hasil (product evaluation). Menurut Badrujaman 2011 yang dikutip dalam (Program et al.. 2024) sasaran utama dari evaluasi terhadap konteks (context evaluation) adalah untuk menelaah status objek secara keseluruhan sehingga dapat memberikan deskripsi mengenai karakteristik lingkungan. Pada pelaksanaan layanan informasi, evaluasi terhadap context bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan yang lama dan prioritas telah sesuai dengan kebutuhan layanan.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan kebijakan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan menggunakan pendekatan evaluasi model CIPP (Context, Input, Process, Product). Analisis dilakukan secara kualitatif melalui triangulasi data wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dibandingkan dengan teori dan temuan terdahulu yang relevan.

### *Evaluasi Konteks*

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024 menyebutkan bahwa terpenuhinya layanan dasar adalah prioritas pembangunan nasional. menunjukkan bahwa stunting telah menjadi masalah nasional. Di antara wilayah administratif lain di DKI Jakarta,

prevalensi stunting di Jakarta Barat mencapai 15,2%, menurut data SSGI 2022. Ini menunjukkan betapa pentingnya menerapkan kebijakan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah dibentuk di seluruh wilayah administratif, termasuk Jakarta Barat, untuk menanggapi situasi ini. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tingkat kelurahan tentang pentingnya program masih rendah. Beberapa pelaksana teknis dan kader tidak memahami kebijakan dan hubungannya dengan tujuan nasional.

Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian dalam internalisasi kebijakan. Sosialisasi kebijakan di tingkat kota belum mencapai pelaksana lapangan dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Febrian & Yusran (2021). yang menyatakan bahwa penerapan kebijakan stunting sering gagal karena metode yang terlalu administratif tanpa mempertimbangkan situasi di lapangan.

Pemetaan sosial dan ekonomi di wilayah prioritas merupakan komponen penting dari konteks yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Padahal, Notoatmodjo (2018) menekankan bahwa ketimpangan ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap akses ke layanan kesehatan dan gizi dasar. Dalam perencanaan intervensi, evaluasi kontekstual seharusnya mempertimbangkan data ini secara lebih mendalam.

Oleh karena itu. evaluasi konteks menunjukkan bahwa, meskipun kelembagaan dan kebijakan sudah tersedia, belum ada strategi yang efektif untuk memberi tahu masyarakat dan pelaksana teknis tentang pentingnya program. Kebijakan akan terus mengalami kesulitan untuk diterapkan jika

tidak ada pendekatan yang didasarkan pada komunitas dan kondisi sosial ekonomi lokal.

Akibatnya, pendekatan komunikasi kebijakan harus diperluas untuk mencakup tidak hanya sosialisasi formal tetapi juga pendekatan pendidikan yang mengaitkan masalah stunting dengan realitas sosial masyarakat. Ini akan memperkuat landasan kontekstual dan mempercepat penerimaan dan partisipasi publik dalam pelaksanaan program.

### *Evaluasi Input*

Menurut evaluasi input, struktur organisasi pelaksana seperti TPPS dan Tim Pendamping Keluarga telah berkembang dari tingkat kota hingga kelurahan. Selain itu, APBD dan dana dekonsentrasi telah digunakan untuk mengalokasikan anggaran. Namun, hambatan utama dalam implementasi teknis program terus menjadi keterbatasan kualitas sumber daya manusia.

Tidak semua anggota staf memahami prinsip konvergensi lintas sektor. Beberapa dari mereka tidak memiliki pemahaman teknis tentang intervensi gizi, dan beberapa tidak terlatih menggunakan instrumen digital monitoring. Hal ini menunjukkan bahwa antara kesiapan pelaksana dan kebutuhan teknis program tidak ada korelasi. Namun, Dong et al. (2020) menyatakan bahwa keberhasilan program stunting di daerah sangat dipengaruhi oleh pendekatan berbasis kapasitas SDM.

Sebaliknya, pengadaan prasarana dan sarana tidak merata. Alat ukur pertumbuhan anak, buku panduan nutrisi, dan bahan makanan tambahan belum dikirim ke beberapa wilayah. Ini mengakibatkan penundaan

pelaksanaan intervensi, terutama untuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita.

Sejauh ini, sumber daya yang ada belum mencukupi secara administratif untuk memenuhi kebutuhan program yang signifikan. Selain itu, tidak ada sistem penghargaan dan pemantauan yang dapat mendorong staf untuk meningkatkan kinerja. Ini menyebabkan kelelahan struktural, terutama ketika pelaksana dihadapkan pada laporan administrasi dan kegiatan lapangan secara bersamaan.

Input kebijakan konvergensi umumnya tersedia, tetapi tidak optimal. Jika tidak didukung oleh kemampuan teknis yang memadai dan sistem kerja yang dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan, dana dan struktur yang tersedia tidak akan cukup. Oleh karena itu, penguatan input harus menysasar peningkatan ketersediaan fasilitas dan kualitas SDM.

### *Evaluasi Proses*

Delapan inisiatif konvergensi telah dilaksanakan secara administratif, tetapi belum mencapai keterpaduan antar sektor secara menyeluruh. Analisis situasi, rembuk stunting, dan pembinaan kader adalah beberapa kegiatan yang dilakukan secara formal, tetapi belum menghasilkan integrasi lintas dinas yang efektif dalam melaksanakan kegiatan di lapangan.

Menurut wawancara, koordinasi antar dinas sangat sedikit. Dinas teknis kurang terlibat dengan dinas lainnya dan lebih fokus pada kegiatan sektoralnya sendiri. Ini membuktikan bahwa struktur formal tidak selalu menghasilkan sinergi fungsional. Intervensi gizi tidak akan memberikan

hasil terbaik di tingkat rumah tangga tanpa integrasi, menurut Aguayo & Menon (2016).

Menurut beberapa informan, rapat koordinasi TPPS di tingkat kota lebih banyak membahas laporan administratif daripada merancang solusi lintas sektor. Ini mendukung asumsi bahwa program lebih berkonsentrasi pada output dokumentasi daripada menyelesaikan masalah nyata masyarakat.

Jadwal kegiatan antar dinas yang tidak sinkron juga menyulitkan pelaksanaan program. Misalnya, kegiatan posyandu dan pemberian makanan tambahan tidak bekerja sama dengan pelatihan gizi, yang membuat intervensi tidak berkelanjutan dan terpisah.

Hasil studi Rabaoarisoa et al. (2017) menyatakan bahwa koordinasi dan sinkronisasi agenda sektor yang buruk menyebabkan kebijakan gizi yang tidak efektif di tingkat lokal. Artinya, struktur TPPS tidak menjamin proses diintegrasikan di lapangan.

Untuk meningkatkan bagian proses, diperlukan sistem koordinasi berbasis jadwal terpadu, sistem pelaporan digital lintas sektor, dan pemimpin OPD yang berkomitmen untuk bekerja sama. Tanpa ini, proses pelaksanaan hanya akan berulang dalam format formalitas tanpa hasil apa pun.

### *Evaluasi Produk*

Menurut evaluasi hasil kebijakan, prevalensi stunting di Jakarta Barat turun dari 16,0% menjadi 15,2% dalam dua tahun terakhir (SSGI 2022). Meskipun ada tanda-tanda perbaikan, angka tersebut masih di atas

target nasional sebesar 14 persen pada 2024. Ini menunjukkan bahwa aksi konvergensi memiliki efek, tetapi belum sepenuhnya.

Di beberapa wilayah kelurahan, kunjungan ke posyandu meningkat dan kesadaran ibu balita tentang nutrisi anak meningkat. Namun, peningkatan pengetahuan belum menjadi praktik yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa produk program tidak berfokus pada perubahan perilaku, yang merupakan ukuran keberhasilan dalam jangka panjang.

Kunjungan ke posyandu meningkat di beberapa wilayah kelurahan dan kesadaran ibu balita tentang nutrisi anak meningkat. Namun, peningkatan pengetahuan belum diterapkan secara berkelanjutan dalam praktik. Ini menunjukkan bahwa produk program tidak berkonsentrasi pada perubahan perilaku, yang merupakan ukuran keberhasilan dalam jangka panjang.

Selain itu, sistem yang bertanggung jawab untuk memantau hasil tidak berjalan dengan baik. Banyak daerah masih mencatat data perkembangan anak secara manual, dan tidak semua dari mereka menggunakan aplikasi digital yang dapat diakses oleh semua pihak. Akibatnya, pelaporan hasil intervensi sering ditunda dan tidak dapat digunakan segera untuk mengubah strategi program.

Hasil wawancara dengan kader juga menunjukkan bahwa meskipun laporan hasil kegiatan biasa dilakukan, tidak semua intervensi dievaluasi secara menyeluruh, dan beberapa kegiatan bahkan tidak memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Ini menunjukkan bahwa evaluasi hasil masih belum menjadi budaya dalam pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan kebijakan menunjukkan kemajuan, tetapi masih terkendala oleh perubahan perilaku, kendala ekonomi masyarakat, dan sistem monitoring hasil yang belum optimal. Oleh karena itu, evaluasi berbasis data real-time serta intervensi ekonomi untuk keluarga yang berisiko stunting harus menjadi prioritas utama.

#### Kelebihan dan Kelemahan Penelitian

Metode dan model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kelebihan. Kontekstual, input, proses, dan produk adalah empat komponen utama pelaksanaan kebijakan yang dapat diamati oleh peneliti dengan model CIPP. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh atas efektivitas kebijakan aksi konvergensi dalam menurunkan stunting di wilayah Jakarta Barat.

Teknik pengumpulan data yang beragam, yang termasuk observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen resmi, merupakan keuntungan lain. Selain memperkuat validitas data, metode triangulasi ini memastikan bahwa temuan tidak bersifat sepihak. Selain itu, keterlibatan langsung peneliti di lokasi memberikan pemahaman kontekstual yang kuat tentang bagaimana implementasi kebijakan dilakukan.

Memilih informan yang terdiri dari kader lapangan, perwakilan OPD, dan tokoh masyarakat memberikan perspektif yang beragam tentang pelaksanaan kebijakan. Hal ini meningkatkan analisis dan meningkatkan generalisasi hasil dalam hal evaluasi program lintas sektor.

Penelitian ini, bagaimanapun, memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah bahwa penelitian tidak dapat mewawancarai semua pihak

terkait secara langsung karena keterbatasan waktu. Beberapa informasi berasal dari perwakilan atau dokumen, yang mungkin tidak mewakili pendapat organisasi atau kelompok secara keseluruhan.

Keterbatasan tambahan adalah kurangnya dokumentasi digital dan visual observasi lapangan. Karena keterbatasan teknis, beberapa kegiatan penting tidak dapat dilakukan. Akibatnya, peneliti hanya dapat memperoleh data melalui cerita lisan informan. Hal ini membatasi pembuktian visual untuk aktivitas aksi konvergensi tertentu.

Kurangnya informasi digital dan visual tentang observasi lapangan juga merupakan kendala. Beberapa kegiatan yang sangat penting tidak dapat dilakukan karena keterbatasan teknis. Akibatnya, peneliti hanya dapat mengumpulkan informasi dengan berbicara dengan informan. Hal ini membatasi pembuktian visual untuk aktivitas aksi konvergensi tertentu.

## **SIMPULAN**

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menunjukkan bagaimana kebijakan konvergensi percepatan penurunan stunting diterapkan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Hasil analisis menunjukkan bahwa karena ada perbedaan antara praktik di lapangan dan desain kebijakan, pelaksanaan kebijakan tidak berjalan dengan baik. Meskipun dokumen perencanaan dan pedoman teknis tersedia, internalisasi kebijakan pada level masyarakat sasaran dan pelaksana teknis masih lemah. Hal ini menyebabkan kebijakan diterapkan secara prosedural tanpa memahami tujuan dan pentingnya kolaborasi dalam penanganan stunting.

Dalam konteks implementasi, banyak aktor terlibat dalam proses pelaksanaan, tetapi tidak ada komunikasi yang efektif antar unit. Masih ditemui tumpang tindih peran antarinstitusi serta keterbatasan koordinasi yang menghambat upaya integratif lintas sektor. Selain itu, pengetahuan teknis pelaksana di tingkat kelurahan dan kecamatan mengenai pendekatan konvergensi terbatas.

Dalam hal input kebijakan, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan dukungan anggaran adalah masalah utama. Banyak pelaksana program yang merangkap tugas tidak menerima pelatihan yang berkelanjutan, dan tidak ada metrik kinerja program stunting yang jelas. Sebaliknya, anggaran pusat dan daerah belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung upaya lokal yang khusus dan sensitif. Situasi ini membuat pelaksanaan kebijakan kurang mendorong untuk menghasilkan perubahan besar.

Program percepatan penurunan stunting di Jakarta Barat cenderung dijalankan dalam kerangka sektoral yang kurang terintegrasi dari sisi proses. Seringkali, kolaborasi antar organisasi bersifat administratif daripada substantif, sehingga tidak menghasilkan intervensi yang saling melengkapi. Meskipun demikian, pendekatan konvergensi menuntut intervensi yang terintegrasi pada tingkat rumah tangga dan individu. Selain itu, catatan penting adalah kurangnya inovasi dalam implementasi program, terutama dalam hal menjangkau kelompok rentan dan mengubah perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa pemahaman aktor pelaksana, efektivitas koordinasi lintas sektor, ketersediaan sumber daya, dan partisipasi masyarakat aktif sangat mempengaruhi keberhasilan

penerapan kebijakan konvergensi percepatan penurunan stunting. Hasil ini menggarisbawahi betapa pentingnya metode evaluasi kebijakan yang melihat keluaran administratif selain proses, konteks, dan efek sosialnya. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan reformasi tata kelola lokal diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan kebijakan multisektor di tingkat akar rumput.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adriany, F., Nursalam, N., & Andriani, N. (2021). Hubungan sanitasi lingkungan dan pengetahuan dengan kejadian stunting pada balita di wilayah Puskesmas Rambah. *Jurnal Kesehatan Global*, 4(1), 17–25. <https://doi.org/10.33085/jkg.v4i1.4767>
- Aguayo, V. M., & Menon, P. (2016). Stop stunting: Improving child feeding, women's nutrition and household sanitation in South Asia. *Maternal & Child Nutrition*, 12(S1), 3–11. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5084809/>
- Amanda, I. P. (2020). Kebijakan publik: Teori, analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan. *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>
- Arifuddin, A., Abdullah, R., & Wahyuni, D. (2023). Original research paper science. *Healthy Tadulako Journal*, 9(9), 7–10.
- Arring, O. D., & Winarti, E. (2024). Peran sanitasi sehat dalam pencegahan stunting: Tinjauan literatur berdasarkan health belief model. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 656–675. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/25383/17910>
- Bernard, H. R. (2017). Coding and analyzing qualitative data. *Field Methods*, 29(4), 413–430. <https://doi.org/10.1177/1525822X17741577>
- Diatmono, P., Mariam, S., & Ramli, A. H. (2020). Analysis of human capital in talent management program, training and development to improve employee competence: Case study in BSG Group. *Business and Entrepreneurial Review*, 20(1), 45–66. <https://doi.org/10.25105/ber.v20i1.6812>

- Dong, B., Zou, Z., Song, Y., Hu, P., Luo, D., Wen, B., Gao, D., Wang, X., Yang, Z., Ma, Y., Ma, J., Narayan, A., Huang, X., Tian, X., & Patton, G. C. (2020). Adolescent health and Healthy China 2030: A review. *Journal of Adolescent Health*, 67(5), S24–S31. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.07.023>
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 11–21. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.214>
- Gurning, F. P., Sari, R. Y. Y., Astuti, R. W., & Sinambela, U. B. M. (2021). Implementasi program pencegahan dan penanggulangan stunting di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Medan tahun 2020. *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 36–42. <https://doi.org/10.37048/kesehatan.v10i1.325>
- Hasan, A., & Kadarusman, H. (2019). Akses ke sarana sanitasi dasar sebagai faktor risiko kejadian stunting pada balita usia 6–59 bulan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(November), 413–421.
- Hasanah, S., Handayani, S., & Wilti, I. R. (2021). Hubungan sanitasi lingkungan dengan kejadian stunting pada balita di Indonesia (studi literatur). *Jurnal Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan*, 2(2), 83–94. <https://doi.org/10.25077/jk31.2.2.83-94.2021>
- Mufida, S., Timur, F. G. C., & Waluyo, S. D. (2020). Strategi pemerintah Indonesia dalam menangani wabah COVID-19 dari perspektif ekonomi. *Jurnal Independen*, 1(2), 121–130. <https://doi.org/10.24853/independen.1.2.121-130>
- Notoatmodjo, S. (2016). *Ilmu perilaku kesehatan* (Cetakan pertama). Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Percepatan Penanggulangan Stunting.
- Permanasari, Y., Permana, M., Pambudi, J., Rosha, B. C., Susilawati, M. D., Rahajeng, E., Triwinarto, A., & Prasodjo, R. S. (2020). Tantangan implementasi konvergensi pada program pencegahan stunting di kabupaten prioritas. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 30(4), 315–328. <https://doi.org/10.22435/mpk.v30i4.3586>

- Rabaoarisoa, C. R., Rakotondrainipiana, M., Rakotonirainy, N. H., & Rakotoarison, P. G. (2017). The importance of public health, poverty reduction programs and women's empowerment in the reduction of child stunting in rural areas of Moramanga and Morondava, Madagascar. *PLOS ONE*, 12(1), e0170863. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0170863>
- Rahman, H., Rahmah, M., & Saribulan, N. (2024). Upaya penanganan stunting di Indonesia: Analisis bibliometrik dan analisis konten. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1), 44–59.
- Rustanto, A. E., & Akhmad, J. (2021). RPTRA activities program in services to the community during the COVID-19 pandemic. In *Proceedings of the 1st Annual International Conference on Natural and Social Science Education (ICNSSE 2020)* (pp. 97–102). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210430.014>
- Siregar, A. B. D. A. (2021). Evaluasi model CIPP. Evaluasi Program dan Kelembagaan Pendidikan Islam, 9(2), 163. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5904>
- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP evaluation model: How to evaluate for improvement and accountability*. The Guilford Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, A., & Jannah, L. M. (2022). Analisis integrasi kebijakan upaya konvergensi program percepatan penurunan stunting Kabupaten Lebak. *Sosio Konsepsia*, 11(2), 349–363. <https://doi.org/10.33007/ska.v11i2.3080>
- Yuwanti, Y., Himawati, L., & Susanti, M. M. (2022). Pencegahan stunting pada 1000 HPK. *Jurnal ABDIMAS-HIP: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 35–39. <https://doi.org/10.37402/abdimaship.vol3.iss1.166>